

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	7
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita : BPK Pusat

Halaman 17

Pengelolaan Anggaran perlu Berorientasi Hasil dan Efisiensi

KEUANGAN NEGARA

JAKARTA, KOMPAS — Orientasi pengelolaan anggaran, baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu diubah. Pengelolaan keuangan tidak lagi ditujukan untuk mengejar predikat wajar tanpa pengecualian, tetapi bagaimana agar anggaran tepat guna dan tepat sasaran.

Saat ini, banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP)

dalam pengelolaan anggaran, tetapi inefisiensi anggaran masih kerap terjadi. Pemberian predikat WTP juga bukan berarti instansi atau lembaga tersebut bebas dari korupsi dan penyelewengan anggaran lainnya.

Peringatan mengenai pentingnya perubahan orientasi pengelolaan keuangan negara ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di hadapan para menteri dan kepala daerah dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keu-

angan Pemerintah Tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/9). Menurut Presiden, pengelolaan keuangan negara seharusnya tak dipandang sebagai urusan teknis dan prosedural belaka.

Fokus hasil

Orientasi pengelolaan anggaran harus diubah, bukan lagi difokuskan pada prosedur melainkan hasil. Setiap program yang didanai anggaran negara maupun daerah harus punya sasaran dan tujuan yang jelas.

Presiden Jokowi menjelaskan, saat ini 85 persen kementerian/ lembaga mendapatkan predikat WTP dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, 90 persen provinsi dan 66 persen kabupaten/kota memperoleh predikat WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan. Meski begitu, masih banyak ditemukan inefisiensi dalam pengelolaan APBN maupun APBD.

Pemberian opini WTP juga tidak berarti institusi yang dimaksud bebas korupsi. "Laporan keuangan berstatus WTP, tidak se-

lalu berarti penggunaan anggaran sudah lebih efisien dan bebas korupsi," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Sebab, kata Sri Mulyani, laporan keuangan pemerintah tidak didesain untuk mengukur ada atau tidaknya korupsi di kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah. Korupsi juga tidak selalu berarti mengambil anggaran. Korupsi juga kerap terjadi dalam bentuk konflik kepentingan hingga meminta komisi proyek pembangunan. (NTA/NAD)